

**LAPORAN KINERJA DAN HASIL KERJA
DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
JAKARTA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
DISIAPKAN OLEH:				
1	Syaifulloh	Pengawas Radiasi Muda		
DIPERIKSA OLEH:				
1	Ida Bagus Manuaba	PK Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi		
2	Grace Esterina	PK Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri		
3	Herry Irawan	PK Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan		
DISAHKAN OLEH:				
1	Asep Saefulloh Hermawan	Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	#	

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Unit Kerja	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	2
D. Isu Strategis	4
E. Peran Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Perjanjian Kinerja	6
B. Rencana Kerja dan Anggaran	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Unit Kerja Tahun 2025	9
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan.....	9
C. Realisasi Anggaran	26
D. Inovasi dan Penghargaan.....	30
BAB IV PENUTUP	32
A. Kesimpulan	32
B. Rekomendasi/Saran.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Sarana dan Prasarana DPFRZR	4
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.....	6
Tabel 3 Daftar Rincian Output Unit Kerja	7
Tabel 4 Rencana Kinerja DPFRZR 2025	8
Tabel 5 Pagu anggaran DPFRZR 2025	8
Tabel 6 Rincian Output dan Target Output DPFRZR	9
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif...	10
Tabel 8 Perbandingan KTUN terbit tahun 2022–2025.....	10
Tabel 9 Rincian KTUN Terbit dan Target KTUN Petugas.....	11
Tabel 10 Pembinaan Teknis dan Layanan Perizinan	11
Tabel 11 Rapat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan.....	11
Tabel 12 Verifikasi dan Evaluasi Lapangan Terkait Perizinan	16
Tabel 13 Pengembangan Sistem Perizinan	17
Tabel 14 Peningkatan Kapabilitas Evaluator.....	18
Tabel 15 Koordinasi dengan Stakeholder.....	19
Tabel 16 Kegiatan Pembinaan Teknis Perizinan.....	20
Tabel 17 Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Lapangan Tahun 2025	20
Tabel 18 Pengembangan Sistem Perizinan Tahun 2025.....	21
Tabel 19 Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan dan Pelaku Usaha Tahun 2025.....	21
Tabel 20 Pelaksanaan Ujian PPR Baru.....	23
Tabel 21 Peserta Ujian PPR Berdasarkan Jenis PPR.....	23
Tabel 22 Pelaksanaan Ujian Perpanjangan PPR.....	24
Tabel 23 Penerbitan Sertifikat Petugas Keamanan Zat Radioaktif	25
Tabel 24 Realisasi Anggaran DPFRZR Tahun Anggaran 2025.....	26
Tabel 25 Rincian pagu dan realisasi anggaran Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan.....	26
Tabel 26 Rincian pagu dan realisasi anggaran Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Fasilitas Penelitian dan Industri	27
Tabel 27 Rincian pagu dan realisasi zin Petugas Fasilitas Radiasi dan Sertifikasi Petugas Keamanan Sumber Radioaktif	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenjang Pendidikan SDM DPFRZR.....	3
Gambar 2. Data penerbitan SIB Petugas selain PPR.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Unit Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia merupakan tanggung jawab Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 yang ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas melalui peraturan, perizinan dan inspeksi dari aspek keselamatan (safety), keamanan (security) dan safeguards.

Perizinan merupakan bentuk pemberian kewenangan (otorisasi) kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR) merupakan unit kerja di BAPETEN yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) serta petugas selain PPR.

Kegiatan Pemanfaatan di fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang menjadi lingkup tugas DPFRZR yaitu :

- penggunaan sinar-X di rumah sakit atau klinik untuk diagnostik, radioterapi, dan, kedokteran nuklir,
- penggunaan sinar-X untuk pengukuran (*gauging*), pemindai bagasi, pemeriksaan kargo dan/ atau peti kemas, uji tak rusak, analisis,
- penggunaan zat radioaktif di bidang radioterapi dan kedokteran nuklir,
- penggunaan zat radioaktif untuk uji tak rusak, well logging, pengukuran (*gauging*), analisis, fasilitas kalibrasi, dan irradiator,

Penerbitan izin bekerja untuk PPR dilaksanakan oleh BAPETEN melalui pengujian, sedangkan untuk izin bekerja petugas selain PPR dilaksanakan melalui validasi.

B. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan tugasnya, dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- b. Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif
- d. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- e. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
- f. Peraturan BAPETEN No. 4 Tahun 2024 tentang Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- g. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
- h. Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
- i. Peraturan BAPETEN No. 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPETEN

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BAPETEN No. 9 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BAPETEN, Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPFRZR menyelenggarakan fungsi:

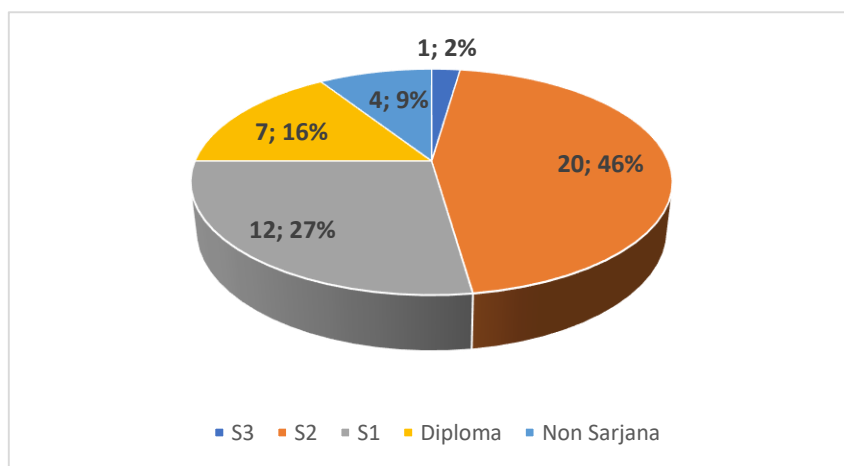
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang penelitian dan industri

- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, dan pembinaan dan pengendalian perizinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang kesehatan
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pengujian dan penerbitan serta pengendalian izin kerja bagi petugas proteksi radiasi, radiografer industri, petugas dosimetri, petugas perawatan dan operator iradiator; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

DPFRZR terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok fungsi, yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri (KFPPFI)
- b. Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan (KFPFK)
- c. Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi (KFPPFR)

Dalam pelaksanaan kegiatan, DPFRZR didukung oleh sumber daya manusia dengan latar belakang yang berbeda. SDM memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Secara keseluruhan, SDM yang ada di DPFRZR adalah 44 orang, dengan jenjang pendidikan S3, S2, S1, diploma dan non sarjana. Data SDM yang ada di DPFRZR berdasarkan jenjang pendidikan disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 1. Jenjang Pendidikan SDM DPFRZR

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPFRZR, selain SDM juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana terutama alat pengolah data dan komunikasi dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SDM baik untuk evaluasi perizinan, pembinaan dan pengembangan sistem serta kegiatan lainnya yang mendukung tugas dan fungsi DPFRZR. Berdasarkan data

inventarisasi BMN, sarana prasarana berupa alat pengolah data dan komunikasi yang tersedia di DPFRZR adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Sarana dan Prasarana DPFRZR

Jenis	Jumlah
Alat Pengolah Data dan Komunikasi	
Personal Computer	41
Laptop	37
Handphone	5
Tablet	6
LCD	4
Printer	35

D. Isu Strategis

Ada beberapa isu strategis terkait perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif yaitu :

1. Semakin meningkatnya jumlah modalitas PET-CT yang beroperasi, kebutuhan akan ketersediaan sumber radioaktif, khususnya radioisotop Fluor-18 (F-18), menjadi semakin krusial. F-18 harus diproduksi dan didistribusikan secara berkesinambungan karena memiliki waktu paruh yang singkat dan berperan penting dalam pemeriksaan PET-CT. Kondisi ini menjadi pemicu tumbuhnya minat dan investasi dari berbagai industri untuk membangun fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka menggunakan Cyclotron di Indonesia.
2. Adanya program percepatan eliminasi TB pada tahun 2030, Kementerian Kesehatan, dengan dukungan United Nations Development Programme (UNDP), membutuhkan pengadaan peralatan diagnostik berupa pesawat rontgen portabel sebagai bagian dari program skrining TB dengan kuantitas yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

E. Peran Strategis

DPFRZR memiliki peran strategis terkait adanya pertumbuhan penggunaan cyclotron untuk produksi radiofarmaka dan juga penggunaan pesawat rontgen portabel untuk skrining TB karena penggunaan alat tersebut membutuhkan perizinan yang akan dievaluasi oleh DPFRZR.

DPFRZR harus menyiapkan kebijakan terkait proses perizinan, peningkatan kapasitas SDM evaluator untuk melaksanakan evaluasi dan verifikasi proses perizinan agar penggunaan peralatan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi dari segi keselamatan dan keamanan tetap terjamin.

Penggunaan alat cyclotron juga membutuhkan persyaratan petugas selain PPR yang mendapatkan izin bekerja yang dievaluasi melalui DPFRZR sehingga DPFRZR perlu melakukan koordinasi dengan lembaga pelatihan dan LSP untuk petugas tersebut, agar ketersediaan petugas selain PPR tidak terkendala dan pengoperasian cyclotron dapat terjamin keselamatannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 telah ditetapkan perjanjian Kinerja yang terdiri dari 4 Indikator kinerja kegiatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Ekspektasi
Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perizinan dan Inspeksi dalam Keselamatan, Keamanan, Garda Aman Ketenaganukliran	Terselenggaranya Layanan Perizinan Bidang Kesehatan dan Industri	Jumlah KTUN Bidang Kesehatan dan Industri (CSF)	6000 KTUN	Terbitnya KTUN bidang kesehatan dan industri secara tepat waktu, akurat, dan sesuai peraturan perundang-undangan guna menjamin keselamatan.
		Tingkat pemenuhan SLA Layanan Perizinan	96 %	Terjaganya tingkat kepatuhan standar layanan perizinan minimal 96% sebagai wujud peningkatan efektivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.
	Terselenggaranya Layanan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan, Industri dan Penelitian/ Lingkungan Hidup	Jumlah KTUN Petugas Keselamatan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif ; serta Petugas Keamanan Zat Radioaktif Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan, Industri dan Penelitian/ Lingkungan Hidup (CSF)	1250 KTUN	Tersedianya Petugas Keselamatan Radiasi dan Zat Radioaktif serta Keamanan Zat Radioaktif Bidang Ketenaganukliran yang kompeten guna mendukung keselamatan operasional di fasilitas.
		Tingkat pemenuhan SLA Layanan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan, Industri dan Penelitian/ Lingkungan Hidup	96 %	Terjaganya tingkat kepatuhan standar layanan perizinan petugas fasilitas radiasi minimal 96% sebagai wujud peningkatan efektivitas, akuntabilitas

				dan kualitas pelayanan publik
Target realisasi anggaran			95	

Berdasarkan penetapan kinerja tersebut maka disusunlah daftar rincian output unit kerja yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 3 Daftar Rincian Output Unit Kerja

Kegiatan	KRO	RO	Volume RO	Alokasi Anggaran (Rp)	Indikator RO
(3568) Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perizinan Inspeksi dalam Keselamatan, Keamanan, Garda Aman Ketenaganukliran	3568.ACB Perizinan Masyarakat	3568.ACB.001 Izin Petugas Fasilitas Radiasi	1.150 Orang	2.075.000.000,-	Jumlah KTUN Petugas Fasilitas Radiasi Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan(CSF);
			96 %		Jumlah KTUN Petugas Fasilitas Radiasi Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Industri dan Penelitian /Lingkungan Hidup (CSF);
	3568.ACD Perizinan Lembaga	3568.ACD.001 Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan	1.500 Ketetapan	1.726.497.000,-	Jumlah KTUN Bidang Kesehatan (CSF)
			96%		Tingkat Pemenuhan SLA Layanan Perizinan Bidang Kesehatan
		3568.ACD.002 Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Fasilitas Penelitian dan Industri	1.500 Ketetapan	1.025.000.000,-	Jumlah KTUN Bidang Industri dan Penelitian (CSF)
			96%		Tingkat Pemenuhan SLA Layanan Perizinan Bidang Industri dan Penelitian.
	3568.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	3568.ADI.002 Sertifikasi Petugas Keamanan Zat Radioaktif	100 Sertifikat	300.000.000,-	Jumlah KTUN Petugas Keamanan Zat Radioaktif Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan(CSF);

					• Jumlah KTUN Petugas Keamanan Zat Radioaktif Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Industri dan Penelitian/Lingkungan Hidup (CSF);
--	--	--	--	--	---

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Berdasarkan Renstra BAPETEN tahun 2025–2029, pada tahun 2025 DPFRZR telah melaksanakan perencanaan kinerja kegiatan. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh unit Eselon II dan merupakan dukungan dalam pencapaian target kinerja kegiatan Kedeputian PI. Pada tahun 2025 telah ditetapkan perencanaan kinerja sebagai berikut:

Tabel 4 Rencana Kinerja DPFRZR 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output
Peningkatan kualitas pengawasan ketenaganukliran melalui penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan inspeksi	Indeks efektivitas Pelayanan Perizinan	Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	Indeks Efektivitas Pelayanan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan
				Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Fasilitas Penelitian dan Industri
				Izin Petugas Fasilitas Radiasi
				Sertifikasi Petugas Keamanan Zat Radioaktif

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka tercapainya output yang sudah ditetapkan, DPFRZR mendapatkan total alokasi pagu anggaran sebesar 5.126.497.000. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga kelompok fungsi dengan masing – masing pagu sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 5 Pagu anggaran DPFRZR 2025

Kelompok Fungsi	Pagu (Rp.)
Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri	1.025.000.000
Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan	1.726.497.000
Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi	2.375.000.000
Total	5.126.497.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Unit Kerja Tahun 2025

Berdasarkan penetapan kinerja dan target output DPFRZR tahun 2025, maka telah dilaksanakan kegiatan untuk mencapai target output tersebut. Realisasi output dan anggaran pelaksanaan kegiatan DPFRZR tahun 2025 disajikan pada tabel 5. Sebagai berikut :

Tabel 6 Rincian Output dan Target Output DPFRZR

Rincian Output	Target Output	Realisasi Output	Capaian Realisasi Output (%)
Jumlah KTUN Bidang Kesehatan	4500 KTUN	8151 KTUN	100
Tingkat Pemenuhan SLA Layanan Perizinan Bidang Kesehatan	96 %	99,82 %	100
Jumlah KTUN Bidang Industri dan Penelitian	1500 KTUN	6045 KTUN	100
Tingkat Pemenuhan SLA Layanan Perizinan Bidang Kesehatan	96 %	99,97%	100
Jumlah KTUN Petugas Fasilitas Radiasi Bidang Ketenaganukliran	1150 KTUN	3009 KTUN	100
Jumlah KTUN Petugas Keamanan Zat Radioaktif Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan, Industri dan Lingkungan Hidup	100 KTUN	109 KTUN	100

Dari output yang sudah ditetapkan tahun 2025 semuanya dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan.

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Analisis capaian indikator Kinerja kegiatan DPFRZ untuk masing – masing output yang sudah ditetapkan dalam penetapan kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah KTUN Bidang Kesehatan dan Industri

Capaian Jumlah KTUN bidang kesehatan dan industri dihitung berdasarkan perbandingan KTUN yang diterbitkan dibandingkan dengan target KTUN tahun 2025. Berdasarkan rekap dari data Balis, KTUN yang terbit dari perizinan Kesehatan industri dan Kesehatan 14196 KTUN, dan target KTUN 2025 sebesar 6000 KTUN sehingga capaian jumlah KTUN 100% atau mencapai target yang sudah ditetapkan.

Rincian realisasi KTUN yang terbit dan target KTUN sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Keterangan	Industri	Kesehatan	Total
Permohonan Masuk	8607	14368	22975
KTUN Terbit	6045	8151	14196
Target KTUN	1500	4500	6000
Melebihi Batas Evaluasi	2	15	17
KTUN Terbit sesuai SLA	6043	8136	14179

Perbandingan penerbitan KTUN Tahun 2022–2025 disajikan pada Tabel 7.

Penerbitan KTUN dilaksanakan melalui Balis perizinan 2.5 berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan BAPETEN No 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, dimana KTUN diterbitkan berdasarkan fasilitas (Lokasi Proyek/Lokasi Usaha) dan juga kegiatan pemanfaatan. Penerbitan KTUN dari 2022 s.d 2025 memiliki tren yang meningkat yang disebabkan karena jumlah pengguna yang meningkat.

Tabel 8 Perbandingan KTUN terbit tahun 2022–2025

Tahun Anggaran	Penelitian & Industri	Kesehatan	Total
2022	4230	5686	9916
2023	5787	7795	13582
2024	6507	8304	14811
2025	6045	8151	14196

2. Tingkat Pemenuhan SLA Layanan Perizinan

Tingkat pemenuhan SLA layanan perizinan dihitung berdasarkan Jumlah KTUN yang terbit sesuai SLA dibandingkan dengan total KTUN yang terbit. SLA layanan perizinan ditetapkan berdasarkan Peraturan BAPETEN No. 1 tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran. Berdasarkan rekapitulasi Balis perizinan 2.5, dari total 14196 KTUN yang diterbitkan terdapat 17 KTUN yang terbit melewati SLA atau KTUN yang terbit sesuai SLA sebesar 14179, sehingga Tingkat pemenuhan SLA berdasarkan perhitungan sebesar 99,9% atau dapat mencapai target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja.

3. Jumlah KTUN Petugas Keselamatan Radiasi dan Zat Radioaktif; serta Keamanan Zat Radioaktif Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan, Industri dan Penelitian/ Lingkungan Hidup

Penerbitan KTUN Petugas Keselamatan radiasi dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Ujian sertifikasi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) untuk pelatihan baru dan penyegaran

- Ujian Sertifikasi Petugas Keamanan Zat radioaktif (PKZR)
- Validasi petugas selain PPR

Capaian Jumlah KTUN petugas keselamatan FRZR dan keamanan Zat radioaktif dihitung berdasarkan perbandingan KTUN yang diterbitkan dibandingkan dengan target KTUN tahun 2025. Berdasarkan rekap dari data Balis, KTUN yang terbit dari petugas keselamatan radiasi dan keamanan sebesar 3118, dan target KTUN 2025 sebesar 1250 sehingga capaian jumlah KTUN petugas dapat mencapai 100%.

Rincian KTUN terbit dan target KTUN petugas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9 Rincian KTUN Terbit dan Target KTUN Petugas

Jenis Petugas	Permohonan Masuk	KTUN Terbit	Target KTUN
PPR	3555	3009	1150
PKZR	135	109	100

Kinerja output tahun 2025 yang mencapai realisasi karena didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang baik, dari kegiatan yang langsung berkaitan dengan output maupun kegiatan yang sifatnya sebagai pendukung. Kegiatan di DPFRZR di laksanakan oleh 3 kelompok fungsi yang ada di DPFRZR.

1. Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan

a. Pembinaan Teknis dan Layanan Perizinan

Tabel 10 Pembinaan Teknis dan Layanan Perizinan

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
1	Pembinaan Teknis dan Layanan Percepatan Perizinan Radiologi Diagnostik dan Intervensional di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	2-5 Juni 2025
2.	Pembinaan Teknis dan Layanan Percepatan Perizinan Radiologi Diagnostik dan Intervensional di Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	23-26 September 2025

b. Rapat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

Tabel 11 Rapat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
1	Rapat Koordinasi dengan UNDP	02 Januari 2025
2	Rapat Koordinasi dengan PT. Redosco Prana Dipta	07 Januari 2025
3	Rapat Koordinasi dengan PT. Siemens Healthineers Indonesia	16 Januari 2025
4	Rapat Koordinasi dengan PT. Prima Jaya Ekspor	17 Januari 2025
5	Rapat Koordinasi dengan PT. Madeena Karya Indonesia	20 Januari 2025
6	Webinar Sosialisasi Implementasi Perba No. 4 Tahun 2024 terkait PPR	20 Januari 2025
7	Rapat Koordinasi dengan PT. Enesers Mitra Berkah	21 Januari 2025
8	Rapat Koordinasi dengan PT. Novartis Indonesia	22 Januari 2025

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
9	Rapat Koordinasi dengan PT. Tekno Molekular Indonesia	23 Januari 2025
10	Rapat Koordinasi dengan RS Yasin Bone	31 Januari 2025
11	Rapat Koordinasi dengan PT. Heme Medi Dianafit	03 Februari 2025
12	Rapat Koordinasi dengan PT. Arkan Jaya Nusantara	04 Februari 2025
13	Rapat Koordinasi dengan RS PKU Muhammadiyah Gamping	07 Februari 2025
14	Rapat Koordinasi dengan RSUD dr. Moewardi	14 Februari 2025
15	Rapat Koordinasi dengan PT. IDS Medical System	14 Februari 2025
16	Rapat Koordinasi dengan Rumkit Dr. M. yasin Bone dan Rumkit Dr. R. Ismoyo Kendari	18 Februari 2025
17	Rapat Konsultasi dengan RSUP M. Hoesin Palembang	25 Februari 2025
18	Rapat Koordinasi dengan PT. Deka Integra Meditama	26 Februari 2025
19	Rapat Koordinasi dengan PT. Redosco Prana Dipta	05 Maret 2025
20	Rapat Koordinasi dengan PT. Sinergi Medika Utama	06 Maret 2025
21	Rapat Koordinasi dengan RSUD Siti Fatimah	06 Maret 2025
22	Rapat Koordinasi dengan PT. Redosco Prana Dipta	11 Maret 2025
23	Rapat Konsultasi Kedokteran Nuklir Bali International Hospital	14 Maret 2025
24	Rapat Konsultasi Izin Konstruksi KN In Vivo PET dan SPECT RS. Murni Teguh Gama City Medan	17 Maret 2025
25	Rapat Koordinasi dengan PT. Sri Intan Perkasa	17 Maret 2025
26	Rapat Koordinasi dengan PT. Wickland Medika Imantara	18 Maret 2025
27	Rapat Koordinasi dengan PT. Surgika Alkesindo	20 Maret 2025
28	Rapat Koordinasi dengan PT. Endo Indonesia	20 Maret 2025
29	Rapat Koordinasi dengan RS Sentra Medika Cibinong	24 Maret 2025
30	Rapat Koordinasi dengan PT. Sinergi Medika Utama	25 Maret 2025
31	Rapat Koordinasi dengan PT Rajawali Cipta Medika	25 Maret 2025
32	Rapat Koordinasi dengan PT. Curie Medika Indonesia	25 Maret 2025
33	Rapat Koordinasi dengan PT Rajawali Cipta Medika	26 Maret 2025
34	Rapat Koordinasi dengan Kemeninvest / BKPM	26 Maret 2025
35	Rapat Koordinasi dengan PT. Siemens Healthineers Indonesia	27 Maret 2025
36	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PT. Pharmindo Rimpang Kokoh	09 April 2025
37	Rapat Koordinasi dengan PT. TMI dan PT. GML	11 April 2025
38	Rapat Koordinasi Balis DPFRZR	11 April 2025
39	Rapat Koordinasi dengan PT. Megah Alkesindo	15 April 2025
40	Rapat Koordinasi dengan PT. Rafa Topaz Utama	16 April 2025
41	Rapat Koordinasi dengan PT. Rafa Topaz Utama	22 April 2025
42	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan RSUD Bali Mandara	23 April 2025
43	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan RSUP Surakarta	23 April 2025
44	Rapat Koordinasi dengan RSUD dr. Tjitrowardojo	30 April 2025
45	Rapat Koordinasi dengan Bali International Hospital	30 April 2025
46	Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Balis 2.5	02 Mei 2025
47	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PT. Redosco Prana Dipta	02 Mei 2025
48	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PT. Siemens Healthineers Indonesia	02 Mei 2025
49	Rapat Koordinasi dengan RS Siloam Karawaci	02 Mei 2025
50	Rapat Koordinasi dengan RS Mayapada	02 Mei 2025
51	Rapat Koordinasi Evaluasi Laporan Hasil Uji Dosis Pekerja Radiasi melalui Balis PENDORA	05 Mei 2025
52	Rapat Koordinasi dengan PT. Sinergi Medika Utama	06 Mei 2025
53	Rapat Koordinasi dengan PT. Triputra Techno Med	06 Mei 2025
54	Rapat Koordinasi dengan PT. Harmoni Nasional Teknologi	07 Mei 2025
55	Rapat Koordinasi dengan PT. Sanbe Farma	07 Mei 2025
56	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PT. Fondaco Jayatama	09 Mei 2025

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
57	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PT.Triputra TechnoMed	14 Mei 2025
58	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PT. Fokus Diagnostic Indonesia	15 Mei 2025
59	Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait Permohonan Izin dengan RS Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa	16 Mei 2025
60	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan RSUD Jatisari Kabupaten Karawang	19 Mei 2025
61	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan RS Mandaya Royal Puri	19 Mei 2025
62	Rapat Koordinasi dengan RSUP dr. Hasan Sadikin	20 Mei 2025
63	Rapat Koordinasi dengan PT. Sinergy Lintas Persada	21 Mei 2025
64	Rapat Koordinasi dengan MRCCC Siloam Hospitals	23 Mei 2025
65	Rapat Koordinasi dengan PT. Inmed Teknotama Cemerlang	26 Mei 2025
66	Rapat Koordinasi dengan PT. Visi Yosindo Medikal	27 Mei 2025
67	Rapat Koordinasi dengan PT. Tekno Molekuler Indonesia	27 Mei 2025
68	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PT. Focus Diagnostik Indonesia	28 Mei 2025
69	Rapat Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	28 Mei 2025
70	Rapat Koordinasi dengan PT. Redosco Prana Dipta	03 Juni 2025
71	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Bali International Hospital	05 Juni 2025
72	Rapat Koordinasi dengan Elekta Medical Solution	10 Juni 2025
73	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan RSUD ODSK Provinsi Sulawesi Utara	11 Juni 2025
74	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PT. Fokus Diagnostic Indonesia	12 Juni 2025
75	Rapat Koordinasi dengan PT. Visi Yosindo Medikal	13 Juni 2025
76	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PI. Fokus Diagnostic Indonesia	16 Juni 2025
77	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Rumah Sakit Umum Haji Medan	18 Juni 2025
78	Rapat Koordinasi dengan PT. Prima Tunas Surya Medika	18 Juni 2025
79	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	19 Juni 2025
80	Rapat Koordinasi dengan PT. Philips Indonesia Commercial	20 Juni 2025
81	Rapat Koordinasi antara Bapeten dengan Kemenkes	24 Juni 2025
82	Rapat Koordinasi dengan PT. Murti Indah Sentosa	30 Juni 2025
83	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PT. Ultra Medica Sejahtera	30 Juni 2025
84	Rapat Koordinasi PT Efarina Etaham	18 Juli 2025
85	Konsultasi Perizinan PT Pocsom Acoma	21 Juli 2025
86	Rapat Koordinasi All KF-PFK	21 Juli 2025
87	Konsultasi RS Mitra Keluarga Kenjeran & konsultan GML, Izin konstruksi KN Reg.108388.25 Alpen Agung Raya	21 Juli 2025
88	Konsultasi Perizinan PT. Oneject	23 Juli 2026
89	Konsultasi Perizinan PT. Racer	22 Juli 2025
90	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PT. Sinergy Lintas Persada	24 Juli 2026
91	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan UPT RSUD RAA Soewondo Pati	24 Juli 2026
92	Konsultasi Perizinan Eka Hosptal BSD	28 Juli 2025
93	Konsultasi Perizinan Bali International Hospital	28 Juli 2025

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
94	Rapat Kordinasi Sistem Balis 2.5 (Sensus Intansi/Fasilitas/Alamat)	29 Juli 2025
95	Konsultasi Perizinan RS Kemenkes Surabaya	29 Juli 2025
96	Rapat Konsultasi Izin impor Cobra Dental Reg. 114704.25	30 Juli 2025
97	Konsultasi Perizinan RSUD Soewondo Pati	30 Juli 2025
98	Konsultasi Perizinan RS Mayapada Healthcare	30 Juli 2025
99	Pihak2 terkait Perizinan Pekerja "Keahlian" -Eksternal BRIN dan Instansi2 Produksi Radioisotop	31 Juli 2025
100	Rapat Kordinasi terkait "Justifikasi"	31 Juli 2025
101	Konsultasi Perizinan UNDP - Kemenkes (TBC) - Alternative	01 Agustus 2025
102	Rapat konsultasi izin pengalihan Visi Yosindo Medical Reg. 114772.25	01 Agustus 2025
103	Sosialisasi atau Webinar Persiapan Proses Bimtek Perizinan Fasilitas Penerima Hibah Alat X-Ray Portabel (24 Alat)	08 Agustus 2025
104	Bimtek dan Asistensi Perizinan SRP (KEMENKES UNDP + USAID)	19–22 Agustus 2025
105	Konsultasi Perizinan Sanbe Farma (RS Santosa Kopo)	22 Agustus 2025 (Pagi)
106	Rapat Koordinasi membahas Prosedur pengukuran paparan radiasi pada fasilitas Kedokteran Nuklir	25 Agustus 2025 (Pagi)
107	Rapat Konsultasi Izin Pengalihan PT. Megah Alkesindo	25 Agustus 2025 (Siang)
108	Rapat Konsultasi AFISMI	26 Agustus 2025 (Pagi)
109	Rapat Konsultasi Fondaco	26 Agustus 2025 (Siang)
110	Rapat Kordinasi BKPM (Sistem Perizinan OSS)	27 Agustus 2025
111	Konsultasi RS Murni Teguh - Medan	27 Agustus 2025
112	Audiensi PT. Fujifilm Indonesia	28 Agustus 2025
113	Konsultasi di Locket RSUD Moewardi terkait konstruksi KN	28 Agustus 2025
114	Rapat Konsultasi Desain Ruang Penyinaran Mamografi terkait dengan Ketebalan Lapisan Pb (Tim PMU SIHREN - Kemenkes RI) akan mengundang Vendor, RS yang diberikan Bantuan Alat Mamografi	15 September 2025
115	Rapat Konsultasi PT. Siemens Healthineers Indonesia terkait PET/CT sebagai simulator radioterapi	15 September 2025
116	Rapat Koordinasi Permohonan Izin Pengalihan dengan PT. Sinergi Medika Utama Nomor Registrasi 118627.25	16 September 2025
117	Rapat Konsultasi Izin Produksi PRP PT Prima Tunas Surya Medika	16 September 2025
118	Rapat Konsultasi Izin Prodduksi PRP PT Rajawali Cipta Medika	17 September 2025
119	Rapat Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan Webinar Pra OTSL DIY	19 September 2025
120	Rapat Konsultasi Izin Konstruksi KN Diagnos&Terapi RSUD Dr Moewardi	22 September 2025
121	Audiensi tim PMU SIHREN Kemenkes RI (IDs Funding) - RT, Mamo	22 September 2025
122	Rapat Konsultasi Desain Ruang Penyinaran Mamografi terkait dengan Ketebalan Lapisan Pb (Tim PMU SIHREN - Kemenkes RI) akan mengundang Vendor, RS yang diberikan Bantuan Alat Mamografi	22 September 2025
123	Rapat Koordinasi Produsen RIRF Dalam Negeri mengenai Mekanisme Persetujuan Pengiriman ZRA periodik	23 September 2025

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
124	Rapat Konsultasi Izin Pengalihan PT. Pharmindo Rimpang Kokoh	23 September 2025
125	Rapat Kordinasi All KF-PFK	29 September 2025
126	Rapat Konsultasi Kedokteran Nuklir RS Indriati Solo Baru	29 September 2025
127	Audiensi Eka Hospital Terkait Rencana Produksi RIRF (kelanjutan Meeting Sebelumnya)	29 September 2025
128	Rapat Konsultasi Presentasi Grand Medika Gemilang	30 September 2025
129	Audiensi tim PMU SIHREN Kemenkes RI (World Bank Funding) - Cathlab	01 Oktober 2025
130	Rapat konsultasi PT Heme Medi Dianafit	01 Oktober 2025
131	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta	08 Oktober 2025
132	Rapat Konsultasi PT Thomasong Nirmala	10 Oktober 2025
133	Rapat Konsultasi RS Murni Sadar - Fasilitas Kedokteran Nuklir	10 Oktober 2025
134	Rapat Konsultasi RS Puskokkes Polri	13 Oktober 2025
135	Pendampingan Proses Perizinan Lembaga B I N	13 Oktober 2025
136	Rapat Konsultasi Kedokteran Nuklir RS Indriati Solo Baru	15 Oktober 2025
137	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PT. Heme Medi Dianafit	01 Oktober 2025
138	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta	08 Oktober 2025
139	Rapat Konsultasi PT. Thomasong Nirmala	10 Oktober 2025
140	Rapat Konsultasi Rumkit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri	13 Oktober 2025
141	Rapat koordinasi dan konsultasi dengan RSD K.R.M.T. Womngsongoro	14 Oktober 2025
142	Rapat Konsultasi KN RS Indriati Solo Baru	15 Oktober 2025
143	Rapat Konsultasi PT. Megah Alkesindo	22 Oktober 2025
144	Rapat Konsultasi PT. Cobra Dental Indonesia	24 Oktober 2025
145	Rapat Internal RS Mandaya	29 Oktober 2025
146	Rapat dengan PT. Fujifilm Indonesia	03 November 2025
147	Webinar Pra OTSL Pesawat Sinar-X Portabel UNDP	10 November 2025
148	Diseminasi Bakti Pengawasan Sosialisasi Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Tahun 2025 bersama Anggota Komisi XII DPR RI	13 November 2025
149	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan PT. Redosco Prana Dipta	14 November 2025
150	Rapat Koordinasi dengan RS. Khusus Kanker Siloam Semanggi (MRCCC Siloam Hospitals) membahas tindak lanjut hasil verifikasi	21 November 2025
151	Rapat Koordinasi dengan PT. IDS Medical System	27 November 2025
152	Rapat Koordinasi dengan PT. IDS Medical System	28 November 2025
153	Rapat Koordinasi dengan PT. Deka Integra Meditama	1 Desember 2025
154	Rapat Koordinasi dengan PT. Grand Medika Gemilang	16 Desember 2025
155	Executive Meeting: Keselamatan Radiasi dan Kendali Mutu Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	18 Desember 2025
156	Rapat Koordinasi dengan PT IDS Medical Systems Indonesia	22 Desember 2025
157	Rapat Koordinasi dengan PT. Perdana Global Niaga	24 Desember 2025

c. Verifikasi dan Evaluasi Lapangan Terkait Perizinan

Verifikasi dilaksanakan dalam rangka memastikan kondisi fasilitas memenuhi persyaratan dan sesuai dengan dokumen yang telah diajukan pada saat proses perizinan. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan verifikasi untuk fasilitas kesehatan sebanyak 38 kali.

Tabel 12 Verifikasi dan Evaluasi Lapangan Terkait Perizinan

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
1	Verifikasi Permohonan Izin Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo Mandaya Royal Hospital Puri, Tangerang	19 - 21 Februari 2025
2	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Persetujuan Hasil Modifikasi Desain Izin Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir In-Vivo Menggunakan PET di RS Mitra Plumbon, Cirebon, Jawa Barat	24–27 Februari 2025
3	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Izin Operasi Fasilitas Radioterapi di Regina Mandiri Husada (RSU Regina Maris)	02–06 Maret 2025
4	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Persetujuan Hasil Modifikasi Desain Izin Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir In-Vivo Menggunakan PET di RS Gading Pluit, Jakarta Utara, DKI Jakarta	03–05 Maret 2025
5	Verifikasi Permohonan Izin Fasilitas Radioterapi RS PKU Muhammadiyah Gamping	17–20 Maret 2025
6	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Persetujuan Hasil Modifikasi Desain Izin Operasi Fasilitas Radioterapi Menggunakan Linac Awal Bros Pekanbaru	14–17 April 2025
7	Verifikasi dalam rangka permohonan izin operasi fasilitas radioterapi di RSUD Undata–Palu, Sulawesi Tengah	21–25 April 2025
8	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Izin Operasi Radioterapi di RS Sentra Medika Cibinong	10–13 Juni 2025
9	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Izin Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka di RSUD AWS	16–19 Juni 2025
10	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Izin Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo BIH	16–19 Juni 2025
11	Verifikasi Dalam Izin Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop Menggunakan Siklotron PT GOF	23–26 Juni 2025
12	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Izin Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Menggunakan PET/CT Scan di PT. Kedoya Adyaraya/RS EMC Grha Kedoya, Jakarta Barat, DKI Jakarta	02–04 Juli 2025
13	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Persetujuan Hasil Modifikasi Fasilitas Radioterapi RS Sentra Medika Cibinong	04–05 Juli 2025
14	Verifikasi dalam rangka Permohonan Izin Operasi RS Ahmad Tabib Kepulauan Riau	14–18 Juli 2025
15	Verifikasi Dalam Rangka Verifikasi Izin Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo Menggunakan PET CT di RS Indriati	16–19 Juli 2025
16	Verifikasi dalam rangka Permohonan Izin Fasilitas Radioterapi RSUD Jayapura	21–25 Juli 2025
17	Evaluasi Lapangan Izin Produksi Pembangkit Radiasi Pengion PT. Oneject Indonesia di Kawasan Industri Terpadu Indonesia China, Kabupaten Bekasi	31 Juli - 01 Agustus 2025

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
18	Verifikasi Permohonan Izin Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik in Vivo dan Terapi di RSUP Surabaya, Jawa Timur	11–15 Agustus 2025
19	Verifikasi Permohonan Izin Fasilitas Radioterapi RS Primaya Bekasi Barat	11–14 Agustus 2025
20	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Izin Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo dan Terapi di RS Awal Bros Pekanbaru, Riau	11–15 Agustus 2025
21	Verifikasi Izin Operasi Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo dan Kedokteran Nuklir Terapi RS Mitra Keluarga Bekasi	19–23 Agustus 2025
22	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Izin Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir menggunakan PET/CT di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur	19–22 Agustus 2025
23	Verifikasi Permohonan Izin Fasilitas Radioterapi RSUP Vertikal Surabaya	01–05 September 2025
24	Evaluasi Lapangan Izin Produksi Pembangkit Radiasi Pngion PT. Poscom Acoma Indonesia di Cikarang - Kabupaten Bekasi	04–05 September 2025
25	Verifikasi Izin Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop Menggunakan Siklotron PT. Global Onkolab Farma Sidoarjo di Kota Sidoarjo - Jawa Timur	15–19 September 2025
26	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Izin Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi PT. Pertamedika Bali Hospital (Bali International Hospital)	17–20 September 2025
27	Verifikasi Izin Operasi Fasilitas Radioterapi di BLU RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, Jawa Tengah	06–10 Oktober 2025
28	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Izin Operasi Fasilitas Radioterapi di RS Kanker Dharmais	15–17 Oktober 2025
29	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Izin Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka di Mandaya Royal Hospital Puri Provinsi Banten	27–31 Oktober 2025
30	Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Izin Operasi Fasilitas Radioterapi di RSUD Aji Muhammad Parikesit Kalimantan Timur	03–07 November 2025
31	Verifikasi dalam rangka Permohonan Izin Fasilitas Radioterapi RS Pusedokkes Polri	04–07 November 2025
32	Verifikasi Permohonan Izin Fasilitas Radioterapi RSK Dharmais	11–14 November 2025
33	Verifikasi Permohonan Izin Fasilitas Radioterapi MRCCC	17–20 November 2025
34	Verifikasi Dalam Rangka Verifikasi Izin Operasi Fasilitas Radioterapi Menggunakan Brakhiterapi di RSUP dr. J. Leimena, Ambon, Maluku	17–20 November 2025
35	Verifikasi Permohonan Izin Fasilitas Radioterapi RS Siloam Makassar	01–05 Desember 2025
36	Verifikasi dalam rangka Permohonan Izin Fasilitas Kedokteran Nuklir RS Bali Mandara	01–05 Desember 2025
37	Verifikasi dalam rangka Permohonan Izin Fasilitas Kedokteran Nuklir RS Hermina Bekasi	08–12 Desember 2025
38	Verifikasi dalam rangka Permohonan Izin Fasilitas Radioterapi RS Siloam Surabaya	08–12 Desember 2025

d. Pengembangan Sistem Perizinan

Selain proses perizinan, DPFRZR juga melaksanakan pengembangan sistem perizinan untuk mendukung kemudahan proses perizinan. Pengembangan sistem terutama

dilakukan pada sistem balis dimana proses perizinan dilaksanakansakan melalui sistem tersebut.

Tabel 13 Pengembangan Sistem Perizinan

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
1	Rapat Koordinasi Membahas Menu Sistem Balis 2.5 Untuk Perubahan Personel dan Perubahan Lokasi	21 Januari 2025
2	Rapat Koordinasi Membahas Menu Sistem Balis 2.5 Untuk Persetujuan	23 Januari 2025
3	Pemutakhiran Rencana Tindak Pengendalian SPIP 2024	Januari 2025
4	Pembuatan Draf Buku Panduan Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional	Februari–Maret 2025
5	Pemutakhiran Draf Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi DPFRZR	Maret 2025
6	Pemutakhiran Draf Prosedur Pengendalian Risiko DPFRZR	Maret 2025
7	Revisi Prosedur Pengendalian Risiko	30 Juni 2025
8	Revisi Prosedur Pengelolaan Perubahan	30 Juni 2025
9	Revisi Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi	30 Juni 2025
10	Revisi Prosedur Pembinaan	30 Juni 2025
11	Revisi Prosedur Pengelolaan Layanan Konsultasi dan Pengaduan	30 Juni 2025
12	Revisi Standar Pelayanan Perizinan Fasilitas Kesehatan	26 September 2025
13	Mengerjakan kertas kerja SPIP	Agustus 2025
14	Pengisian bukti dukung PEKPPP Kemenpan RB	September 2025
15	Audit Eksternal ISO 9001:2015	29-30 September 2025
16	Rapat Koordinasi Balis 2.5 Implementasi PP No. 28 Tahun 2025	1-2 Oktober 2025
17	Forum Konsultasi Publik Produksi RIRF	18 Desember 2025
18	Audit Internal DPFRZR	19 Desember 2025

e. Peningkatan Kapabilitas Evaluator

Tabel 14 Peningkatan Kapabilitas Evaluator

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
1	Peningkatan Kapasitas SDM Evaluator Perizinan (Capacity Building)	4-7 Agustus 2025

2. Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri

a. Koordinasi dengan Stakeholder

Tabel 15 Koordinasi dengan Stakeholder

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
1	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Implementasi Perba No. 05 Tahun 2024	16 Januari 2025
2	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Membahas Menu Sistem Balis 2.5	22 Januari 2025
3	Rapat Koordinasi terkait Pemenuhan Izin Pemanfaatan Alat Pemindai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai–Kementerian Keuangan RI	10 Februari 2025
4	Rapat Koordinasi dengan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta (BPAFK Jakarta)	22 April 2025
5	Rapat Koordinasi Pembahasan Close Statement PT Halliburton Logging Services Indonesia	30 April 2025
6	Rapat Koordinasi dengan DPIBN Membahas kegiatan perakitan (crimping) zat radioaktif Ir-192 oleh PT. Pratita Prama Nugraha	16 Mei 2025
7	Rapat Koordinasi Kegiatan Perakitan (Crimping) Zat Radioaktif Ir-192 oleh PT. Pratita Prama Nugraha	11 Juni 2025
8	Rapat Koordinasi terkait penyampaian hasil evaluasi pemantauan dosis oleh Laboratorium Dosimetri	12 Juni 2025
9	Rapat Koordinasi Terkait Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025	16 Juni 2025
10	Kegiatan FGD Aplikasi Iradiasi Pangan Untuk Mendukung Ekspor Produk Pertanian Indonesia oleh ORTN - BRIN	29 Juli 2025
11	Rapat Koordinasi Terkait Rencana Kegiatan Perakitan (Crimping) Zat Radioaktif Ir-192 oleh PT. Pratita Prama Nugraha	11 Agustus 2025
12	Kunjungan Kerja ke PRTKMMN - BRIN dalam rangka Rencana Audit Dosimetri Fasilitas Iradiator	27 Agustus 2025
13	Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Audit Dosimetri Fasilitas Iradiator dengan BPOM, Barantin, dan BRIN	29 Agustus 2025
14	Rapat Koordinasi Persiapan Diklat Dosimetri Iradiator Presentasi SOP Iradiator	10 September 2025
15	Rapat Koordinasi Pembahasan Perizinan Sumber yang dimiliki DJBC	16 September 2025
16	Rapat Pembahasan Tindak lanjut penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kementerian dan Lembaga Tahun 2025	13 Oktober 2025
17	Rapat Audiensi Perizinan Skema Re-Use dengan BSN dan BRIN	19 November 2025
18	Kunjungan Lapangan terkait Penggunaan Peralatan Sumber Radiasi Pengion (Pemindai X-Ray) pada Pelabuhan Penumpang di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia	26 November 2025
19	Kunjungan Kerja Dalam Rangka Koordinasi Perizinan di Provinsi Banten	10–11 Desember 2025
20	Rapat Koordinasi Terkait Sistem Balis	12 Desember 2025
21	Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Akhir Tahun 2025 Unit Kerja DPFRZR	18–20 Desember 2025

b. Kegiatan Pembinaan Teknis Perizinan

Tabel 16 Kegiatan Pembinaan Teknis Perizinan

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
1	Percepatan Pelayanan Perizinan dan Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Medan, Sumatera Utara	11–16 Agustus 2025
2	Pembinaan Teknis Perizinan Uji Tak Rusak (UTR) dan Pengukuran (Gauging) di Serang, Banten	02–04 September 2025
3	Percepatan Pelayanan Perizinan dan Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Bali	06–11 Oktober 2025
4	Pembinaan Teknis Perizinan Uji Tak Rusak (UTR) di Batam, Kepulauan Riau	22–24 Oktober 2025
5	Pembinaan Teknis Sistem Perizinan Berbasis Risiko (OSS RBA) untuk Kegiatan Operasi Fasilitas Iradiator dan Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Uji Tak Rusak di Yogyakarta	29–31 Oktober 2025

c. Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Lapangan Tahun 2025

Tabel 17 Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Lapangan Tahun 2025

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
1	Verifikasi Perizinan Izin Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif di PT Pratita Prama Nugraha di Batam, Kepulauan Riau	18–20 Februari 2025
2	Evaluasi Lapangan Perizinan Pemeriksaan Kargo dan/atau Peti Kemas Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion (Gate Impor) di PT Pelindo Terminal Peti Kemas Semarang, Jawa Tengah	25–27 Februari 2025
3	Evaluasi Lapangan Perizinan Pemeriksaan Kargo dan/atau Peti Kemas Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion (Gate Impor) di PT IPC Terminal Peti Kemas, Jakarta	28–29 April 2025
4	Evaluasi Lapangan Izin Pemeriksaan Kargo dan/atau Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion di PT Terminal Petikemas Surabaya	04–07 Mei 2025
5	Verifikasi lapangan terkait proses izin operasi fasilitas kalibrasi Badan Standardisasi Nasional, Jakarta	14–16 Mei 2025
6	Evaluasi Lapangan Perizinan Pemeriksaan Kargo dan/atau Peti Kemas Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion (Lanjutan) di PT IPC Terminal Peti Kemas, Jakarta	21 Mei 2025
7	Verifikasi Lapangan terkait Jaminan Mutu untuk Izin Operasi Fasilitas Kalibrasi BSN	03 Juni 2025
8	Verifikasi lapangan terkait permohonan izin Operasi Fasilitas iradiator Kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion di BRIN, Jakarta	04–05 Juni 2025
9	Verifikasi lapangan Permohonan Izin Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II PT. Jayamas Medica Industri, Jawa Timur	17–20 Juni 2025
10	Evaluasi Lapangan Monitoring Radiasi Lingkungan di Kawasan Industri Modern Cikande	28–30 Agustus 2025
11	Verifikasi Lapangan dalam rangka proses Izin Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion di PT EDS Manufacturing Indonesia	18–20 September 2025
12	Verifikasi Lapangan dalam rangka proses Izin Operasi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion di BPAFK Jakarta	29–30 September 2025

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
13	Verifikasi Lapangan dalam rangka proses Izin Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pngion PT Rel-ion Sterilization Services, Jawa Barat	14–17 Oktober 2025
14	Evaluasi Lapangan Bebas Kontaminasi PT. Lami Packaging Indonesia	05 November 2025
15	Verifikasi Perizinan dalam rangka proses permohonan Izin Operasi Fasilitas Kalibrasi di NuklindoLab–Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan (JKRL), Banten	04–06 Desember 2025
16	Verifikasi Lapangan untuk Izin Pemeriksaan Kargo dan/atau Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pngion di PT Belawan New Container Terminal, Sumatera Utara	21–24 Desember 2025

d. Pengembangan Sistem Perizinan Tahun 2025

Tabel 18 Pengembangan Sistem Perizinan Tahun 2025

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
1	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Implementasi Perba No. 03 Tahun 2024	14 Januari 2025
2	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Implementasi Perba No. 04 Tahun 2024	15 Januari 2025
3	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Implementasi Perba No. 05 Tahun 2024	16 Januari 2025
4	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pembahasan Menu Sistem Balis 2.5 untuk Perubahan Personel dan Perubahan Lokasi	21 Januari 2025
5	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pembahasan Menu Sistem Balis 2.5 untuk Perubahan Penambahan/Pengurangan Sumber Radiasi Pngion	22 Januari 2025
6	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pembahasan Menu Sistem Balis 2.5 untuk Persetujuan	23 Januari 2025
7	Rapat Koordinasi DPFRZR dengan KFDI terkait Registrasi Alamat di Balis	22 April 2025
8	Rapat Koordinasi Terkait Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025	16 Juni 2025
9	Pelatihan Audit Dosimetri Fasilitas Iradiator	22–26 September 2025
10	Rapat Koordinasi Terkait Sistem Balis	12 Desember 2025
11	Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Akhir Tahun 2025 Unit Kerja DPFRZR	18–20 Desember 2025

e. Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan dan Pelaku Usaha Tahun 2025

Tabel 19 Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan dan Pelaku Usaha Tahun 2025

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
1	Rapat Konsultasi Perizinan Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST)–Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	23 Januari 2025
2	Rapat Konsultasi dengan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan Pembahasan Presentasi Hasil Komisioning Izin Operasi Fasilitas Kalibrasi	10 Februari 2025

No	Topik	Tanggal Pelaksanaan
3	Rapat Konsultasi dengan PT. Pelindo Terminal Petikemas, Tanjung Emas - Semarang	11 Februari 2025
4	Rapat Konsultasi dengan PT Pratita Prama Nugraha Terkait Perizinan Crimping Iridium-192 Radiografi Industri	13 Februari 2025
5	Rapat Konsultasi Teknis Pemenuhan Izin Operasi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pngion di Badan Standardisasi Nasional (BSN)	24 Februari 2025
6	Rapat Konsultasi dengan PT Gamma Energy Indonesia terkait Demo Alat Radiografi Industri	03 Maret 2025
7	Rapat Konsultasi dengan PT Mettler Toledo Indonesia terkait Bimbingan Teknis Perizinan	11 Maret 2025
8	Rapat Konsultasi Teknis Perizinan untuk Izin Pemindaian Peti Kemas/Kargo dengan PT Mitrabuana Widyasakti	27 Maret 2025
9	Rapat Konsultasi Teknis Perizinan Badan Standardisasi Nasional (BSN)	09 April 2025
10	Rapat Koordinasi dengan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta (BPAFK Jakarta)	22 April 2025
11	Rapat Koordinasi dengan PT. Pratita Prama Nugraha	24 April 2025
12	Rapat koordinasi rencana kegiatan perakitan (crimping) zat radioaktif Ir192 oleh PT. Pratita Prama Nugraha untuk kegiatan Uji Tak Rusak	30 April 2025
13	Rapat Konsultasi Perizinan dengan PT. Hisatama Jaya Mandiri	02 Mei 2025
14	Rapat koordinasi dan konsultasi rencana kegiatan perakitan (crimping) zat radioaktif Ir-192 oleh PT. Pratita Prama Nugraha	11 Juni 2025
15	Rapat Konsultasi Perizinan PT Tekno Molekular Indonesia	23 Juni 2025
16	Rapat koordinasi lanjutan terkait rencana kegiatan perakitan (crimping) zat radioaktif Ir-192 oleh PT. Pratita Prama Nugraha	11 Agustus 2025
17	Rapat Koordinasi Perizinan	26 Agustus 2025
18	Rapat konsultasi dengan PT Nuklir Teknologi Indonesia	27 Agustus 2025
19	Rapat Koordinasi Pembahasan Perizinan Sumber yang dimiliki DJBC	16 September 2025
20	Rapat Konsultasi Teknis Perizinan dengan PT Exelitas Technologies Batam	18 September 2025
21	Rapat Konsultasi dengan PT GE Operation Indonesia	01 Oktober 2025
22	Rapat Konsultasi Teknis Perizinan dengan BRIN	06 Oktober 2025
23	Rapat Konsultasi Teknis Perizinan dengan PT Radpro Energi Mandiri	20 Oktober 2025
24	Rapat Konsultasi Teknis Perizinan dengan PT Excelitas Technologies Batam	04 November 2025
25	Rapat Konsultasi Teknis Perizinan dengan PT FMC Technologies Subsea Indonesia	05 November 2025
26	Rapat Audiensi Perizinan Skema Re-Use dengan BSN dan BRIN	19 November 2025
27	Rapat Konsultasi Teknis Perizinan dengan Badan Usaha Pelabuhan Batam	20 November 2025
28	Rapat Konsultasi Teknis Perizinan dengan PT Prasasti Nusantara Sukses	27 November 2025
29	Rapat Konsultasi Teknis Perizinan	08 Desember 2025

3. Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi

a. Ujian PPR Baru

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 69 kali ujian untuk PPR baru di 13 lembaga pelatihan. Ujian dilaksanakan untuk memastikan kompetensi calon PPR yang sudah melaksanakan pelatihan di Lembaga pelatihan yang sudah ditunjuk. Ujian dilaksanakan melalui ujian tulis, ujian praktek dan ujian lisan. Apabila peserta ujian lulus, maka peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi dan akan diterbitkan SIBnya. Data pelaksanaan ujian PPR baru tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 20 Pelaksanaan Ujian PPR Baru

Nama Lembaga	Jumlah penyelenggaraan	Peserta Lulus	Peserta Tidak Lulus	Tingkat Kelulusan
Akurasindo Setya Medika	5	220	47	82,4%
Apronuki	4	39	8	83,0%
ATRO Citra Bangsa	1	29	26	52,7%
CMPB-UI	2	35	4	89,7%
Universitas Airlangga	2	33	7	82,5%
UNDIP	4	27	26	50,9%
BAPETEN (DJBC)	2	26	0	100,0%
Dwijaya Utama Perkasa	3	35	13	72,9%
Gaung Mitra Andalan	3	29	18	61,7%
Gayuh Setya Utama	13	281	51	84,6%
INTERGY	11	300	80	78,9%
NUKLINDO	16	229	59	79,5%
Universitas Lambung Mangkurat	1	14	4	77,8%
Visi Yosindo	2	35	7	83,3%
Total	69	1332	350	79,2%

Data Berdasarkan Jenis PPR sebagai berikut:

Tabel 21 Peserta Ujian PPR Berdasarkan Jenis PPR

Jenis PPR	Lulus	Tidak Lulus	Tingkat Kelulusan
Uji Tak Rusak Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	153	60	71,8%
Pemeriksaan Nonmedik Pada Manusia dengan PRP	3	0	100,0%
Pemindai Bagasi atau Barang Lainnya Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	49	13	79,0%
Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan SRP	4	1	80,0%
Penyimpanan Sementara ZRA dan PRP	4	0	100,0%
Produksi Radioisotop atau Radiofarmaka	3	0	100,0%
Perekaman Data Dalam Sumur Pengeboran (well logging)	38	1	97,4%
Pengukuran (Gauging)	109	26	80,7%
Produksi Peralatan Yang Menggunakan PRP	5	3	62,5%

Jenis PPR	Lulus	Tidak Lulus	Tingkat Kelulusan
Analisis	83	22	79,0%
Iradiator	4		100,0%
Ekspor, Impor, Pengalihan SRP	58	6	90,6%
Kedokteran Nuklir	22	3	88,0%
Radioterapi	32	3	91,4%
Radiologi Diagnostik dan Intervensial	765	212	78,3%
Total	1332	350	79,2%

b. Penyegaran dan Ujian Perpanjangan PPR

Ujian perpanjangan dilaksanakan untuk PPR yang memiliki SIB yang masa berlakunya akan berakhir, sebagai persyaratan perpanjangan SIB tersebut. Sebelum mengikuti ujian, peserta wajib mengikuti pelatihan penyegaran di Lembaga pelatihan yang sudah mendapat penunjukan oleh BAPETEN. Ujian penyegaran dilaksanakan melalui ujian lisan atau wawancara. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penyegaran dan ujian perpanjangan 31. Rincian pelaksanaan ujian perpanjangan sebagaimana tabel berikut.

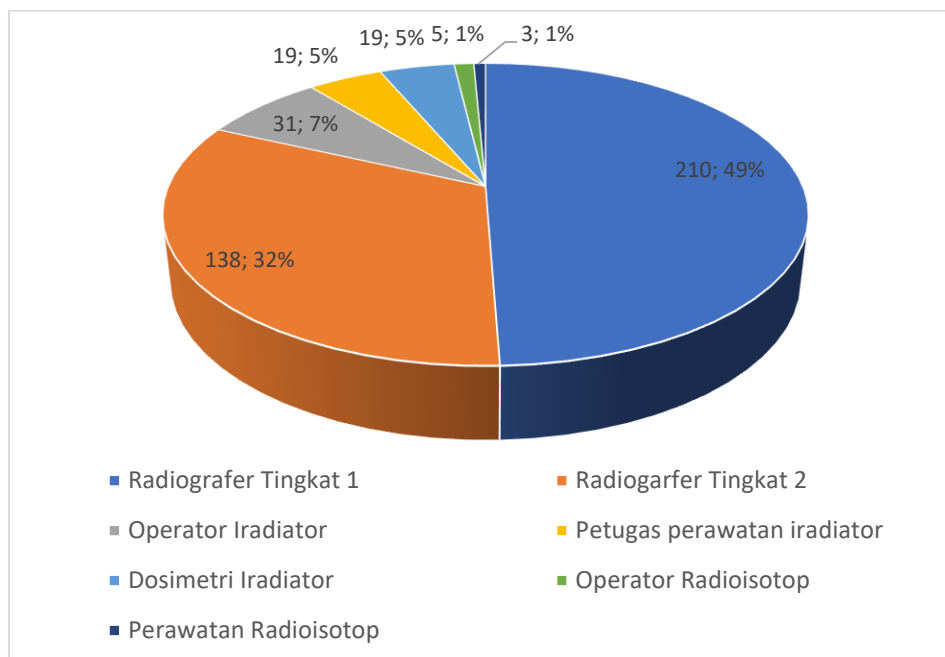
Tabel 22 Pelaksanaan Ujian Perpanjangan PPR

Lembaga Penyelenggara	Jumlah Penyelenggaraan	Jumlah Peserta
Akurasindo Setya Medika	6	306
APRONUKI	-	-
ATRO Citra Bangsa	1	26
CMPB-UI	2	23
Universitas Airlangga	-	-
UNDIP	1	22
BAPETEN	1	60
Dwijaya Utama Perkasa	2	45
Gaung Mitra Andalan	2	18
Gayuh Setya Utama	3	170
INTERGY	8	284
NUKLINDO	5	298
Universitas Lambung Mangkurat	-	-
VISI YOSINDO	-	-
Total	31	1252

c. Validasi Petugas selain PPR

Validasi dilaksanakan untuk penerbitan SIB petugas selain PPR yang sudah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari LSP. Pada tahun 2025

telah diterbitkan KTUN (SIB) dari proses validasi sebanyak 425 KTUN. Data penerbitan SIB petugas selain PPR sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Data penerbitan SIB Petugas selain PPR

d. Ujian Sertifikasi Petugas Keamanan Zat Radioaktif (PKZR) Tahun 2025

PKZR merupakan petugas yang dipersyaratkan untuk fasilitas yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan menggunakan zat radioaktif. Untuk mendapatkan sertifikat sebagai PKZR, seseorang harus mengikuti pelatihan di Lembaga pelatihan yang sudah ditunjuk dan kemudian lulus ujian sebagai PKZR. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 9 kali ujian PKZR dengan persentase kelulusan 80,7%. Data pelaksanaan ujian PKZR sebagaimana tabel

Tabel 23 Penerbitan Sertifikat Petugas Keamanan Zat Radioaktif

Lembaga Pelatihan	Penyelenggaraan	Lulus	Tidak Lulus	Tingkat Kelulusan
Gaung Mitra Andalan	1	17	7	70,8%
Intergy	4	61	13	82,4%
Citra Bahasa Global	1	15	2	88,2%
PDL-TC	3	16	4	80,0%
Total	9	109	26	80,7%

e. Evaluasi Penyelenggaraan Ujian PPR dan PKZR

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan ujian PPR dan PKZR. Evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan di hotel Novotel Bandung tanggal 15–16 Desember 2025. Evaluasi terkait pelaksanaan ujian oleh penguji dan juga penyelenggaraan pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh

lembaga pelatihan. Dalam rapat evaluasi tersesbut juga dibahas rencana pelaksanaan pengujian tahun 2026.

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan di DPFRZR menggunakan pagu anggaran dari PNPB dan Rupiah Murni anggaran tahun 2025. Pada tahun 2025 ditetapkan pagu alokasi anggaran DPFRZR sebesar 5.126.497.000 dengan target PNPB sebesar 15.343.687000. Realisasi APBN tahun 2025 mencapai 18.500.054.000 (120,6%) dan realisasi anggaran sebesar 5.122.319.426 (99,92). Berikut adalah realisasi anggaran DPFRZR tahun anggaran 2025:

Tabel 24 Realisasi Anggaran DPFRZR Tahun Anggaran 2025

Rincian Output	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
Jumlah KTUN Bidang Kesehatan	1.726.497.000	1.722.573.950	99,77
Tingkat Pemenuhan SLA Layanan Perizinan Bidang Kesehatan			
Jumlah KTUN Bidang Industri dan Penelitian	1.024.851.666	1.024.851.666	99,99
Tingkat Pemenuhan SLA Layanan Perizinan Bidang Kesehatan			
Jumlah KTUN Petugas Fasilitas Radiasi Bidang Ketenaganukliran	2.075.000.000	2.075.000.000	100
Jumlah KTUN Petugas Keamanan Zat Radioaktif Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan, Industri dan Lingkungan Hidup	300.000.000	299.893.810	99,96
Total	5.126.497.000	5.122.319.426	99,92

Pada tahun 2025, target realisasi anggaran yang ditetapkan sebesar 97%. Berdasarkan capaian realisasi anggaran tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan yaitu secara keseluruhan realisasi anggaran sebesar 99,92%.

Berikut adalah detail realisasi per rincian output:

Tabel 25 Rincian pagu dan realisasi anggaran Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan

No	Kode	Suboutput / Komponen / Akun	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan						
1	3568.ACD.001	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan 113500	1.726.497.000	1.722.573.950	3.923.050	99,7%
	051 . Evaluasi	Perizinan Bidang Kesehatan	62.542.000	60.127.000		100,0%
	521211	Belanja Bahan	2.415.000	2.415.000	-	100,0%
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	60.127.000	60.127.000	-	100,0%
	052 . Verifikasi dan Evaluasi Lapangan		189.633.000	189.633.000		100,0%

No	Kode	Suboutput / Komponen / Akun	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
		Permohonan Izin				
	524111	Belanja perjalanan biasa	171.443.000	171.443.000	-	100,0%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.190.000	18.190.000	-	100,0%
	053 .	Pembinaan Teknis dan Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	875.354.000	871.437.350	3.916.650	99,6%
	521211	Belanja Bahan	187.408.000	187.407.100	900	100,00%
	522151	Belanja Jasa Profesi	18.600.000	16.200.000	2.400.000	87,1%
	524111	Belanja perjalanan biasa	169.346.000	167.255.807	3.742.034	98,8%
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	93.165.000	93.165.000	0	100,0%
	524111	Belanja perjalanan biasa	142.559.000	143.133.443	-574.443	100,4%
	521211	Belanja Bahan	145.750.000	145.750.000	0	100,0%
	521213	Honor Output Kegiatan	5.700.000	5.700.000	0	100,0%
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	29.326.000	29.326.000		100,0%
	522151	Belanja Jasa Profesi	14.500.000	14.500.000		100,0%
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	69.000.000	69.000.000		100,0%
	054 .	Pengembangan Sistem Manajemen Perizinan	598.968.000	387.059.600	6.400	100,0%
	521211	Belanja Bahan	20.880.000	20.880.000		100,0%
	521211	Belanja Bahan	14.182.000	14.182.000		100,0%
	522151	Belanja Jasa Profesi	14.800.000	14.800.000		100,0%
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	182.920.000	182.920.000		100,0%
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.715.500	4.500		100,0%
	522191	Belanja Jasa Lainnya	110.000.000	110.000.000		100,0%
	524211	Belanja perjalanan biasa - luar negeri	216.466.000	216.464.100	1.900	100,0%
Keterangan: Pagu diblokir (<i>atomic adjustment</i>)						

Tabel 26 Rincian pagu dan realisasi anggaran Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Fasilitas Penelitian dan Industri

No	Kode	Suboutput / Komponen / Akun	Pagu	Realisasi	Sisa	% realisasi
Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri						
1	3568.ACD.002	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Fasilitas Penelitian Dan Industri 113400	1.025.000.000	1.024.851.666	148.334	99,99%
	051 .	Proses Evaluasi Perizinan Bidang Penelitian dan Industri	89.046.000	-	89.035.000	99,99%
	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	-	-	-	
	521211	Belanja Bahan	77.446.000	77.435.000	11.000	99,99%
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	11.600.000	11.600.000	-	100,00%
	052 .	Pengembangan Sistem Manajemen Perizinan	121.369.000	121.363.940	5.060	100,00%
	522151	Belanja Jasa Profesi	4.500.000	4.500.000	-	100,00%
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66.265.000	66.262.500	2.500	100,00%
	522191	Belanja Jasa Lainnya	22.500.000	22.500.000	-	100,00%
	524111	Belanja perjalanan biasa	20.154.000	20.151.440	2.560	99,99%

No	Kode	Suboutput / Komponen / Akun	Pagu	Realisasi	Sisa	% realisasi
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.950.000	7.950.000	-	100,00%
	053 . Verifikasi dan Evaluasi Lapangan Permohonan Izin		57.164.000	57.163.000	1.000	100,00%
	524111	Belanja perjalanan biasa	22.628.000	22.627.000	1.000	100,00%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.880.000	5.880.000	-	100,00%
	524111	Belanja perjalanan biasa	27.473.000	27.473.000	-	100,00%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.183.000	1.183.000	-	100,00%
	054 . Koordinasi dan Pembinaan Teknis Perizinan		757.421.000	757.289.726	131.274	99,98%
	521211	Belanja Bahan	43.848.000	43.846.850	1.150	100,00%
	522151	Belanja Jasa Profesi	6.000.000	6.000.000	-	100,00%
	524111	Belanja perjalanan biasa	114.609.000	114.609.000		100,00%
	524111	Belanja perjalanan biasa	209.487.000	209.474.931	12.069	99,99%
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	262.133.000	262.033.694	99.306	99,99%
	524111	Belanja perjalanan biasa	-	-	-	
	524119	Meeting Luar Kota	121.344.000	121.325.251	18.749	99,98%
Keterangan: Pagu diblokir (Automatic adjustment)						

Tabel 27 Rincian pagu dan realisasi zin Petugas Fasilitas Radiasi dan Sertifikasi
Petugas Keamanan Sumber Radioaktif

No	Kode	Suboutput / Komponen / Akun	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi						
1	3568.ACB.001	Izin Petugas Fasilitas Radiasi 113600	2.075.000.000	2.075.000.000	0	100,00%
	051 . Perencanaan dan Persiapan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi dsan Zat Radioaktif		13.562.000	15.485.922	1.923.922	114,19%
	521211	Belanja Bahan	13.562.000	15.485.922	1.923.922	114,19%
	052 . Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Layanan Perizinan Petugas FRZR		8.005.000	7.950.400	54.600	99,32%
	A	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Layanan Perizinan Petugas FRZR	8.005.000	7.950.400	54.600	99,32%
	521211	Belanja Bahan	1.128.000	1.080.000	48.000	95,74%
	524111	Belanja perjalanan biasa	6.877.000	6.870.400	6.600	99,90%
	053 . Penyelenggaraan Ujian Petugas Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif		853.760.000	852.550.598	1.209.402	99,86%
	521211	Belanja Bahan	5.775.000	5.766.000	9.000	99,84%
	521213	Honor Output Kegiatan	163.950.000	163.950.000	-	100,00%
	524111	Belanja perjalanan biasa	547.975.000	546.780.598	1.194.402	99,78%
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.800.000	13.800.000		100,00%
	524111	Belanja perjalanan biasa	122.260.000	122.254.000	6.000	100,00%
	054 . Pelaksanaan Penyegaran Petugas Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif		910.408.000	910.023.080	384.920	99,96%
	A	Persiapan Kegiatan	181.036.000	180.795.550	240.450	99,87%

No	Kode	Suboutput / Komponen / Akun	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
		Penyegaran PPR				
	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	-	-	-	
	521211	Belanja Bahan	24.424.000	24.183.550	240.450	99,02%
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	156.612.000	156.612.000	-	100,00%
	B	Penyelenggaraan PPR Bidang Medik	193.841.000	193.696.530	144.470	99,92%
	522151	Belanja Jasa Profesi	7.000.000	7.000.000	-	
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	186.841.000	186.696.530	144.470	99,93%
	C	Penyelenggaraan PPR Bidang Industri	535.531.000	535.531.000	-	100,00%
	522151	Belanja Jasa Profesi	3.600.000	3.600.000	-	100,00%
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.237.000	49.237.000	-	100,00%
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	482.694.000	482.694.000	-	100,00%
	055 . Evaluasi Kegiatan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif		156.129.000	155.936.000	193.000	99,88%
	521211	Belanja Bahan	67.525.000	67.332.000	193.000	99,71%
	522151	Belanja Jasa Profesi	2.000.000	2.000.000	-	100,00%
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	86.604.000	86.604.000	-	100,00%
	056 . Pembinaan Teknis Petugas Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif		107.655.000	107.655.000	-	100,00%
	521211	Belanja Bahan	32.155.000	32.155.000	-	100,00%
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	75.500.000	75.500.000	-	100,00%
	057 . Penguatan Kapabilitas SDM		22.030.000	22.030.000	-	100,00%
	521211	Belanja Bahan	1.155.000	1.155.000	-	100,00%
	522151	Belanja Jasa Profesi	2.000.000	2.000.000	-	100,00%
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.875.000	18.875.000	-	100,00%
	058 . Pengembangan sistem pelayanan perizinan petugas tertentu di fasilitas radiasi		3.451.000	3.369.000	82.000	97,62%
	521211	Belanja Bahan	3.451.000	3.369.000	82.000	97,62%
1	3568.ADI.002	Sertifikasi Petugas Keamanan Zat Radioaktif 113600	300.000.000	299.893.810	106.190	99,96%
	051 . Perencanaan Kegiatan Sertifikasi Petugas Keamanan Zat Radioaktif		6.861.000	6.861.000	-	100%
	521211	Belanja Bahan	1.155.000	1.155.000	-	100%
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	5.706.000	5.706.000	-	100%
	052 . Persiapan Kegiatan Sertifikasi Petugas Keamanan Zat Radioaktif		36.293.000	36.293.000	-	100%
	521211	Belanja Bahan	2.310.000	2.310.000	-	100%
	524111	Belanja perjalanan biasa	15.108.000	15.108.000	-	100%
	524114	Belanja Perjalanan	18.875.000	18.875.000	-	100%

No	Kode	Suboutput / Komponen / Akun	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
		Dinas Paket Meeting Dalam Kota				
	053 . Sertifikasi Radioaktif	Petugas Keamanan Zat	178.087.000	177.980.810	106.190	99,94%
	521211	Belanja Bahan	3.465.000	3.465.000	-	100%
	521213	Honor Output Kegiatan	83.350.000	83.350.000	-	100%
	524111	Belanja perjalanan biasa	11.272.000	11.272.000	-	100%
	524111	Belanja perjalanan biasa	80.000.000	79.893.810	106.190	99,87%
	054 . Evaluasi Kegiatan Sertifikasi	Petugas Keamanan Zat Radioaktif	75.294.000	75.294.000	-	100%
	522151	Belanja Jasa Profesi	1.800.000	1.800.000	-	100%
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73.494.000	73.494.000	-	100%
	055 . Pengembangan Sistem Layanan Sertifikasi PKZR		3.465.000	3.465.000	-	100%
	521211	Belanja Bahan	3.465.000	3.465.000	-	100%

D. Inovasi dan Penghargaan

Pada tahun 2025 DPFRZR dapat mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015.



Untuk meningkatkan pelayanan perizinan, DPFRZR juga telah melaksanakan inovasi terkait pelaksanaan percepatan pelatihan dan pengujian PPR untuk alat fluoroskopi bagasi untuk instansi Direktorat Jenderal Bea Cukai yang untuk mengatasi

kendala persyaratan PPR untuk izin penggunaan pesawat sinar – X untuk fluoroskopi bagasi.

DPFRZR telah berkoordinasi dengan BHKK dan DP2FRZR perihal kebijakan implementasi Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2024 yang dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0129 Tahun 2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2024.

DPFRZR telah menyusun Kurikulum dan Silabus Penyegaran PPR serta Panduan Teknis Tim Penguji PPR menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2024.

DPFRZR telah berkoordinasi dengan BPIK dalam pengembangan sistem Balis Pekerja untuk menyesuaikan ketentuan mengenai lingkup petugas, ujian baru, ujian perpanjangan dan penyegaran PPR sesuai Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2024.

DPFRZR telah berkoordinasi dalam Rapat Penguji PPR di Bandung mengenai pelaksanaan ujian ulang wawancara perpanjangan secara daring, mengingat urgensi kelangsungan usaha Pemegang Izin. Mekanisme teknis pelaksanaan ujian ulang wawancara secara daring telah diatur dalam SOP Ujian Perpanjangan Kompetensi PPR. Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa ujian praktik UTR Fotofluorografi dan UTR Tomografi dibedakan dengan ujian praktik UTR Radiografi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

3. Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan di DPFRZR dapat berjalan dengan baik dengan capaian yang melampaui target yang ditetapkan.
4. Berdasarkan target perjanjian kinerja yang ditetapkan, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan
5. Realisasi anggaran dan PNBP dapat mencapai target yang sudah ditetapkan, masing-masing 99,92% dan 120,6%.

B. Rekomendasi/Saran

1. Pelayanan Perizinan Fasilitas Kesehatan harus terus ditingkatkan kualitasnya agar dapat meningkatkan kepuasan pengguna, terutama implementasi sistem perizinan terintegrasi dengan sistem OSS RBA dan kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan terkait agar tercapai sinergi dan inovasi layanan perizinan.
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Investasi/BKPM, Badan Standarisasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi (BRIN), DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu perlu ditingkatkan.
3. Koordinasi dengan pemangku kepentingan perlu ditingkatkan untuk memecahkan permasalahan.
4. Pemantauan, evaluasi, dan perbaikan seluruh kegiatan perlu dilakukan secara konsisten untuk memastikan keberhasilan pencapaian target.

Jakarta, 12 Januari 2026
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan
Zat Radioaktif

LAMPIRAN I DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan Percepatan Pelayanan Perizinan dan Pelatihan Proteksi Radiasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan



Kegiatan Percepatan Pelayanan Perizinan dan Pelatihan Proteksi Radiasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan



Kegiatan Pengembangan Sistem Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat radioaktif



Kegiatan Verifikasi Lapangan di PT EDS Manufacturing



Kegiatan Verifikasi Perizinan di RS Awal Bros Pekanbaru



Kegiatan Rakor Keselamatan Radiasi dan Kendali Mutu Produksi Radioisotop & Radiofarmaka



Kegiatan Pengujian Petugas Keamanan Zat radioaktif di PT Excelitas Indonesia



Kegiatan Rakor Evaluasi Penyelenggaraan Ujian PPR dan PKZR



Kegiatan Pelaksanaan Ujian Petugas Proteksi Radiasi